



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Hafiz Dwi Putra
Cika Vanny

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kemenkes RI

Isu Strategis

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor esensial dalam pembangunan suatu bangsa. SDM yang berkualitas akan berdampak positif terhadap pembangunan nasional dan kemandirian bangsa. Indonesia saat ini sedang berada pada masa bonus demografi yaitu proporsi jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif. Bonus demografi tersebut dapat menjadi peluang emas untuk melakukan percepatan pembangunan nasional karena melimpahnya SDM dengan usia produktif. Namun peluang tersebut harus didukung dengan mempersiapkan SDM agar berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi. Bonus demografi yang tidak didukung dengan SDM berkualitas hanya akan menjadi “beban” demografi bagi bangsa.

Namun, diketahui bahwa produktivitas dan daya saing SDM Indonesia terbilang masih cukup rendah. Dalam *Asian Productivity Organization (APO) Productivity Databook: 2021* tercatat bahwa produktivitas pekerja Indonesia jika dilihat dari nominal gaji, masih berada di peringkat keempat di regional ASEAN atau berada di bawah Singapura, Malaysia serta Thailand. Selain itu, data yang dirilis dalam *Global Competitiveness Report Tahun 2019* oleh *World Economic Forum (WEF)* mengungkap bahwa peringkat daya saing Indonesia menempati posisi 50 dari 141 negara di dunia atau turun 5 peringkat dari tahun 2018 yang menempati urutan 45 dari 140 negara. Di tingkat regional, daya saing Indonesia juga tertinggal dari Singapura, Malaysia serta Thailand.

Kebutuhan atas tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan adaptif dalam merespon permintaan industri dan pasar kerja belum dapat dipenuhi secara optimal oleh SDM di Indonesia melatarbelakangi rendahnya produktivitas dan daya saing. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pembangunan SDM harus menjadi prioritas dan menjadi bagian dari proses serta tujuan dalam pembangunan nasional. Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 telah menetapkan peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas nasional yaitu pada PN 3. Adapun strategi untuk mewujudkan prioritas nasional tersebut adalah dengan menetapkan kegiatan prioritas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri yang merupakan salah satu dari 43 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan dapat menjawab tantangan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan

2022

Komisi IX

serta kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri (*link and match*) dan mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan dan perubahan industri yang dinamis.

Salah satu pelaksana dari *Major Project* pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pelaksanaan program pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri pada Kemenkes dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan (telah berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan) yang melibatkan satuan kerja (satker) yaitu Pusdik SDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan Politeknik Kesehatan, Puskatmutu SDM Kesehatan dan Pusrengun SDM Kesehatan. Kemenkes telah menetapkan program pendidikan dan pelatihan vokasi pada tahun 2021 yang direncanakan untuk kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, Pendidikan SDM Kesehatan, Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi serta Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan. Pelaksanaan program pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri pada Kemenkes dilaksanakan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes).

Program pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Kemenkes diharapkan dapat menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan (SDMK) sesuai standar yang kompeten. SDMK atau tenaga kesehatan merupakan komponen utama penting bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia dan merupakan bagian dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang memiliki peran sebagai pelaksana upaya kesehatan, mendukung pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDMK yang berkualitas dan kompeten akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan berbagai indikator kesehatan seperti angka harapan hidup.

Permasalahan

Atas penyelenggaraan pendidikan vokasi oleh Kemenkes, BPK telah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dunia kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kemenkes dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, NTT dan NTB. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa Kemenkes belum optimal dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama IDUKA. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan yang signifikan, diantaranya **Kemenkes belum menjamin mutu pendidikan tinggi vokasi selaras dengan IDUKA secara memadai.**

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Kemenkes belum optimal dalam menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan IDUKA yang mendukung penguasaan karakter kerja, *softskill*, bahasa asing dan belum didukung dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Diketahui bahwa terdapat 23 kurikulum inti yang sudah lebih dari lima tahun, namun belum juga dilakukan revisi oleh Badan PPSDM Kesehatan. Selain itu, terdapat tujuh kurikulum inti yang belum segera dilakukan pemutakhiran setelah adanya penetapan Standar Kompetensi dan Standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan dalam tiga tahun terakhir. Kemenkes diketahui belum memiliki kebijakan mengenai instrumen yang jelas dalam melakukan evaluasi dan revisi terkait pemutakhiran kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ada. Kemenkes juga belum optimal dalam melibatkan peran serta IDUKA yang telah bermitra dengan Poltekkes Kemenkes dalam penyusunan kurikulum institusional Poltekkes karena dari survei kepada 738 mitra IDUKA, terdapat 339 mitra yang belum dilibatkan. Kemudian hasil survei kepada mitra IDUKA terkait kemampuan peserta didik atau lulusan Poltekkes Kemenkes menunjukkan masih perlu untuk ditingkatkan, terutama terkait kecakapan kerja teknis, penguasaan bahasa asing, *soft skill*, dan penguasaan karakter kerja.

Kemenkes juga diketahui belum optimal menetapkan kebijakan terpadu dalam melakukan perluasan dan penguatan pelaksanaan pendidikan vokasi yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik yang selaras dengan IDUKA melalui *Teaching*

Factory (TEFA). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei kepada 82 responden manajemen Poltekkes Kemenkes yang menunjukkan bahwa masih terdapat 23 Poltekkes Kemenkes yang belum mempunyai TEFA, sehingga pembelajaran berbasis praktik hanya dilakukan melalui bengkel/laboratorium/*workshop*. Badan PPSDM Kesehatan juga diketahui belum memiliki kebijakan terkait penerapan TEFA/*teaching industry* dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi vokasi bidang kesehatan di Poltekkes Kemenkes serta belum memiliki pendataan, pemetaan dan pemantauan dan evaluasi penerapan TEFA/*teaching industry* oleh Poltekkes Kemenkes secara lengkap. Kemudian terkait dengan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik Poltekkes Kemenkes yang dibutuhkan untuk meningkatkan praktik keahlian, khususnya terkait pengetahuan terhadap perkembangan kebutuhan industri agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan sesuai kebutuhan IDUKA, diketahui hasil survei mengungkap 88% responden pihak manajemen Poltekkes Kemenkes menjawab bahwa PKL peserta didik dilakukan kurang dari enam bulan atau minimal satu semester atau belum sesuai dengan panduan magang pendidikan tinggi vokasi dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “magang dilaksanakan minimal satu semester atau setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, sesuai dengan perhitungan beban belajar yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2020”.

Selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana (sarpras), diketahui bahwa Badan PPSDM Kesehatan belum memiliki kebijakan standar sarpras pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan vokasi bidang kesehatan. Selain itu Badan PPSDM Kesehatan belum memiliki pemetaan, pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan dan analisis kebutuhan sarpras pada Poltekkes Kemenkes dengan kesesuaian standar sarpras vokasi bidang kesehatan pada tahun 2020 dan 2021. Dari pemeriksaan uji petik ada data aplikasi APKAL atas ketersediaan alat laboratorium pada enam prodi Poltekkes Kemenkes Surabaya, menunjukkan masih terdapat 39 laboratorium pada prodi Poltekkes yang memiliki selisih ketersediaan alat laboratoriumnya dengan rasio ketersediaan pada standar laboratorium yang mencapai di atas 70% s.d. 100% sebanyak 1.588 alat laboratorium.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa Kemenkes belum optimal melakukan peningkatan pelatihan dan pendidikan tenaga pendidik vokasi sesuai kompetensi, serta belum didukung monev secara berkala. Hasil survei kepada 1.366 dosen Poltekkes Kemenkes terkait peningkatan kompetensi bagi dosen setiap tahun menunjukkan bahwa 464 dosen menyatakan belum mendapatkan peningkatan kompetensi setiap tahun atau secara berkala. Adapun 118 responden yang mengikuti program pelatihan diketahui belum sesuai dengan latar belakang pendidikan bidang studi/prodi/bidang keahlian yang diajarkan. Diketahui bahwa Badan PPSDM Kesehatan belum melakukan pemetaan tenaga pendidik vokasi sesuai kompetensinya. Selain itu, dari uji petik pada lima Poltekkes yang menyampaikan usulan pelatihan dosen/tenaga pendidik terakhir pada tahun 2019 pada aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pelatihan (SIBULAT), diketahui belum ada *feedback* dari Puslat SDM Kesehatan karena tidak dilakukan pengkajian kebutuhan pelatihan bagi dosen/tenaga pendidik oleh Puslat SDM Kesehatan pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan belum adanya standar kompetensi pegawai Kemenkes yang menunjang pengkajian kebutuhan atas pelatihan tenaga pendidik tersebut.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat berakibat pada upaya penguatan praktek kerja pada pendidikan vokasi yang berbasis IDUKA dalam peningkatan kompetensi lulusan pendidikan vokasi berpotensi tidak sesuai dengan standar kompetensi IDUKA dan upaya mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik pendidikan vokasi berpotensi tidak tercapai. Dengan kata lain, permasalahan di atas juga mengakibatkan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan IDUKA. Hal tersebut berpotensi untuk menjadi hambatan dalam pencapaian *link and match* lulusan pendidikan vokasi dengan IDUKA.

Saran Perbaikan

Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Kemenkes diharapkan dapat menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan (SDMK) yang kompeten dan sesuai dengan standar IDUKA. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya perlu untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan demi memastikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Kemenkes dapat berjalan dengan baik dan mutunya sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Selain itu, Komisi IX DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang bermitra dengan Kemenkes juga perlu melakukan pengawasan untuk memastikan mutu atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh Kemenkes serta mendorong Kemenkes untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di antaranya memerintahkan Kepala Pusdik SDM Kesehatan agar meningkatkan koordinasi dengan Direktur Poltekkes Kemenkes dalam pendataan pemenuhan dan kebutuhan pendidikan bagi dosen/tenaga pendidik sesuai kompetensinya serta menetapkan beberapa kebijakan terkait:

1. Mekanisme penyusunan dan pematkhiran penyalarsan kurikulum bidang kesehatan dengan kebutuhan IDUKA, KKNl, standar kompetensi dan SNPT.
2. Penerapan *teaching factory/teaching industry* dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi vokasi bidang kesehatan di Poltekkes Kemenkes dalam mendukung penguasaan keterampilan berbasis praktik.
3. Mekanisme pendataan dan pemetaan terkait: penerapan *teaching factory/teaching industry* Poltekkes Kemenkes, tenaga pendidik vokasi sesuai kompetensi, ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi dosen/tenaga pendidik.
4. Standar sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kesehatan.

Referensi

- APO. 2021. *Asian Productivity Organization (APO) Productivity Databook: 2021*. Japan.
- BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- World Economic Forum. 2019. *Global Competitiveness Report 2019*. Switzerland.